

Submitted:
September 15, 2021
Revised:
November 17, 2021
Published:
November 30, 2021

CONTACT

Correspondence Email:
eensyaputra23@gmail.com

Address: Jl. Raden
Fattah, Pagar Dewa,
Kota Bengkulu.

KEYWORDS

Multicultural Society,
Islamic Sultane,
Multicultural
Community, Relation,
Cultural Exchange.

MASYARAKAT MULTIKULTUR INDONESIA PADA MASA AWAL PERKEMBANGAN ISLAM: SEBUAH TELAAH LITERATUR

EEN SYAPUTRA¹, RIRIN SELVIANTI²

¹ UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia

² STIT Makrifatul Ilmi, Bengkulu Selatan, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to examine literature on Indonesian multicultural society during the Islamic Sultane era, especially from the 13th century until the arrival of the West in the 16-17th centuries. In particular, there are three aspects that will be the main discussion: 1) multicultural community; 2) relation with foreign nations; and 3) cultural exchange. This research was conducted with library research. The research steps undertaken are: 1) preparing tools and equipment; 2) compiling a working bibliography; 3) arranging research time; 4) reading and making research notes, and 5) concluding and analyzing the results of the research. The results of the research showed that: 1) during the Islamic Sultane, in Nusantara developed port cities, in which there were various foreign merchant communities such as Benggalis, Venetians, Turks, Arabs, Persians, Gujarat, Indians, Malays, Javenese, etc. This kind of thing happened in almost every Islamic Sultane, from Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Banten to Sulawesi, Kalimantan and Maluku; 2) during the Islamic Sultane, the people of the Nusantara experienced a change in perspective from inward looking to outward looking so that intense and broad relations were established with many foreign nations, not only Arab but aslo others. These relation take place not only in trade, but also in education, poilitics, etc; 3) intense interaction with the nations makes the people of Nusantara acquainted with many cultural elements, resulting in a cultural encounter. This cultural meeting eventually gave birth to cultural acculturation in various fields, such as clothing, architecture, culinary, tradition, esc.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Tidak hanya multi-etnis (Jawa, Batak, Bugis, Bali, Minang, Aceh, Melayu dan lain-lain), tetapi juga multi-mental (India, Cina, Arab, Belanda, Portugis, Hinduisme, Budhaisme, Konfusione, Islam, Kristen, Kapitalis dan seterusnya). Pada satu sisi, keberagaman tersebut merupakan sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya, namun pada sisi yang lain keberagaman tersebut juga mengandung potensi konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal. Tidak hanya itu, karena Indonesia merupakan arena pangaruh multi-mental, maka konflik dalam skala yang lebih besar bahkan dapat terjadi antar peradaban (Huntington, 2005).

Dalam konteks Indonesia di beberapa dekade belakangan, terutama sejak bergulirnya era reformnasi, kegagalan dalam mengelola keberagaman tersebut merupakan suatu realita yang harus diakui. Hal ini dapat kita lihat dari pecahnya berbagai konflik dan kerusuhan-kerusuhan sosial berbasis SARA di beberapa tempat di Indonesia, seperti konflik antara pemeluk agama Islam dan Kristen di Ambon, konflik antara Islam dan Kristen di Poso dan lain-lain. Hal ini belum lagi ditambah dengan sederet konflik antara pusat-daerah seperti di Aceh dan Papua yang hingga kini juga belum sepenuhnya selesai (Ried, 2005; Crouch, 2005).

Menanggapi berbagai peristiwa tersebut, ada banyak interpretasi tentang penyebab konflik yang kemudian muncul. Berdasarkan berbagai analisis tersebut, didapati sebua kesamaan bahwa salah satu penyebabnya ialah akibat lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep multikulturalisme, dimana terdapat semacam keengganan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Karena itu, tidak heran jika yang mencul kemudian ialah sikap etnosentrisme, streotif, intoleransi, prasangka, fanatisme, ujaran kebencian dan lain-lain (Tilaar, 2004).

Menghadapi permasalahan yang demikian, maka salah satu solusi yang tepat ialah dengan cara membumikan ideologi multikulturalisme. Menurut Suparlan (2002:98) multikulturalisme adalah solusi yang tepat untuk mewujudkan Indonesia yang multikultur. Dengan ideologi multikulturalisme, maka akan tercipta sebuah situasi dimana keberagaman dianggap sebagai sebuah realita yang harus diterima, diakui, dan dihormati. Dengan demikian, maka juga akan tercipta sebuah sikap untuk saling menerima dan menghormati antar sesama manusia tanpa mempermasahkan perbedaan latar belakang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Karena alasan itu pula, maka usaha-usaha ke arah pengembangan kesadaran dan sikap multikulturalisme menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Secara sederhana, istilah multikulturalisme berarti paham banyak budaya. Adapun yang menjadi konsepsi dasar dari multikulturalisme adalah kesetaraan kelompok dan individu-individu (Huat, 2002:120). Dalam pandangan multikulturalisme, perbedaan atau keberagaman adalah sebuah realitas yang harus diterima, bukan sebagai sesuatu yang harus ditentang atau dipermasalahkan. Karena itu, semua kelompok adalah setara dengan kelompok yang lainnya dan setiap individu setara dengan individu-individu yang lainnya (Kymlicka, 2002; Kahn, 2016).

Menurut Harahab (2006) dalam pengertian yang lebih luas, multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu Negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk memperthankan kemajekukan tersebut. Di era globalisasi seperti sekarang, multikulturalisme merupakan sebuah modal social-budaya yang dapat digunakan sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai bentuk kesulitan (Tilaar, 2004). Lebih lanjut Abidin (2009:287) menjelaskan bahwa yang diharapkan dari multikulturalisme adalah terciptanya sikap toleransi yang tinggi, terhindar dari konflik dan kekerasan dan terwujudnya sosial ekonomi.

Lebih lanjut, Syahrin Harahab (2011:151) menjelaskan multikulturalisme dapat dikategorikan menjadi dua tipe utama, yakni multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normative. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan social yang mencerminkan adanya keberagaman, sedangkan multikulturalisme normative ialah berkenaan dengan dasar-dasar moral yang mengikat para warga untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama. Dalam pengertian yang kedua ini, maka berbagai kultur yang ada dalam suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan, hanya saja diperlukan kesadaran dari masing-masing pemilik kultur untuk mengakui dan menghargai kultur lainnya yang berbeda.

Dalam perspektif agama Islam, multikultural atau keberagaman merupakan *sunnatullah* dan menjadi sistem nilai yang universal. Islam mempunyai misi profetik yang ditujukan untuk membela martabat kemanusiaan, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai (Anwar, 2007; Madjid, 1998). Sifat *sunnatullah* dan sistem nilai universal sangat baik dipraktekkan dalam kehidupan masa kini yang menglobal, yang menuntut keunggulan kompetensi untuk menghadapi persaingan. Selain itu, sifat *sunnatullah* dan sistem nilai universal, jika ditempatkan dalam proses pembelajaran akan menghasilkan nilai-nilai etik dalam berelasi maupun dialog yang dapat mencegah munculnya kecenderungan pandangan-pandangan mengenai *the truth claim* (merasa paling benar) dan *the others* (tidak menghargai pandangan yang berbeda).

Dalam konteks sejarah Islam di Indonesia, pemahaman dan pemaknaan terhadap multikulturalisme pada dasarnya sudah ada sejak lama. Hal ini antara lain dapat dilihat dari proses islamisasi yang berlangsung secara damai dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kultural (Azra, 1995). Dengan cara bertahap, tanpa menolak dengan keras sosio kultural masyarakat sekitar, Islam memperkenalkan toleransi dan persamaan derajat (Kuntowijoyo, 1991; Sunanto, 2005). Bukti lainnya adalah berupa sikap terbuka dan bersahabat dari para penguasa dan masyarakat lokal terhadap orang/bangsa asing yang datang. Dari sikap terbuka dan bersahabat inilah kemudian muncul interaksi yang intens antar/inter unsur kultural (Arab, Cina, India, Parsi, dll) yang pada gilirannya kemudian melahirkan pertukaran ide dan silang budaya, kerjasama ekonomi dan politik dan lain-lain (Ried, 1988).

Singkatnya, multikulturalisme bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Nusantara/Indonesia, terutama sejak kedatangan Islam pada abad ke-7 dan lebih-lebih setelah mengalami perkembangan pesat pada abad ke-13 dan masa-masa sesudahnya. Dalam konteks Indonesia kekinian, khususnya masyarakat Islam, multikulturalisme masyarakat Nusantara zaman Islam tersebut merupakan sebuah *role model* serta sumber pelajaran penting tentang bagaimana perbedaan diposisikan sebagai *sunnatullah*, bukan sebagai sumber permusuhan. Berdasarkan alasan tersebut, maka artikel ini akan membahas beberapa hal berikut: 1) komunitas multikultur di Nusantara pada zaman Kesultanan Islam; 2) relasi antara masyarakat Nusantara dengan bangsa asing pada zaman Kesultanan Islam; dan 3) pertukaran budaya antara masyarakat Nusantara dengan bangsa asing pada zaman Kesultanan Islam.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat dan mengolah data penelitian (Zed, 2008:3). Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi diri bahan-bahan koleksi perpustakaan saja (buku, artikel jurnal, majalah ilmiah, media massa dan laporan penelitian) tanpa melakukan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan lain-lain). Beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) menyiapkan alat dan perlengkapan; 2) menyusun bibliografi kerja; 3) mengatur waktu penelitian; 4) membaca dan membuat catatan penelitian; dan 5) menyimpulkan dan menganalisis hasil penelitian (Zed, 2008). Untuk analisis data, secara khusus penulis akan menggunakan teknik analisis isi/konten, yakni suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorff, 1991).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat multikultur Nusantara/Indonesia pada dasarnya sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Pada zaman kuno misalnya, masyarakat Nusantara sudah terlibat dalam perdagangan internasional melalui jalur sutra. Dengan demikian, interaksi antara orang-orang Nusantara dengan bangsa asing, terutama Cina, India dan Arab pada dasarnya sudah terjalin sejak lama.

Jejak-jejak multikulturalisme masyarakat Nusantara juga dapat dijumpai pada zaman Kerajaan Hindu-Budha. Pada periode akhir Kerajaan Majapahit misalnya, orang-orang muslim mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari raja sehingga dapat beraktivitas secara bebas di lingkungan kerajaan. Ma Huan, seorang Tionghoa Islam yang datang ke Majapahit pada tahun 1413 mengatakan bahwa penduduk kota Majapahit terdiri atas tiga golongan, yakni orang-orang Islam, orang Tionghoa dan rakyat yang masih menyembah berhala (Soekmono, 1973). Bahkan, Raja Brawijaya V memiliki seorang istri keturunan bangsawan Champa yang bernama Dewi Kiem, yang

dari sinilah kemudian lahir Jin Bun (Raden Fattah), pendiri Kerajaan Demak di kemudian hari (Joebagio, 2013). Selain itu, banyaknya peninggalan berupa makam-makam Islam yang ditemukan di daerah bekas ibukota Majapahit juga merupakan bukti dari tingginya toleransi Majapahit terhadap Islam

Dengan datangnya Islam, pengaruh Hindu-Budha secara perlahan mengalami penurunan. Satu persatu Kerajaan Hindu-Budha di Nusantara mengalami keruntuhan atau bermetamorphosis menjadi Kesultanan Islam. Di Sumatera, Kesultanan Samudra berdiri pada tahun 1297 dan menandai dimulainya era pengaruh Islam di Nusantara. Setelah runtuh pada tahun 1350, Samudra kemudian digantikan oleh Malaka hingga tahun 1511 serta oleh Kesultanan Aceh Darussalam (Tjandrasasmita, 1982). Di Jawa, kerajaan Islam yang pertama adalah kerajaan Demak, lalu Banten, Pajang hingga Mataram. Dari Sumatera dan Jawa, Islam kemudian mengalami perkembangan hingga Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara hingga Papua. Dalam proses islamisasi ini, sekali lagi perlu dicatat ialah besarnya peran perdagangan dan jaringan ulama, baik antara Nusantara dan Timur Tengah ataupun antar masyarakat Nusantara sendiri.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana jejak-jejak masyarakat multikultural di Nusantara pada masa Kesultanan Islam, berikut ini akan diuraikan beberapa hal, yakni komunitas multikultur, relasi dan jejaring, dan pertukaran budaya.

3.1 Komunitas Multikultur

Telah disinggung sekilas pada bagian sebelumnya bahwa sejak lama Nusantara sudah menjadi arena pertemuan bagi bagi para pedagang asing. Komunitas multikultur juga sudah terbentuk sejak lama, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas niaga. Namun, pada masa Kesultanan Islam, komunitas multikultur semakin mengalami peningkatan, tidak hanya perkampungan/komunitas lokal (Jawa, Bugis, Melayu dll), tetapi juga komunitas asing seperti Arab, Cina, India, Persia hingga bangsa Eropa. Mula-mula, komunitas multikultur (diaspora-diaspora perdagangan) berkembang di daerah-daerah pesisir atau pelabuhan (Priyono, 2008). Namun dalam perkembangannya kemudian, komunitas multikultur juga tidak hanya terbatas pada kota pelabuhan saja, tetapi juga pada sekitar ibu kota kerajaan.

Dari semua daerah di Nusantara, wilayah ujung pulau Sumatera merupakan tempat yang pertama kali mendapatkan sentuhan Islam. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis, yakni dekat dengan Selat Malaka yang kala itu merupakan jalur penting bagi dunia niaga Internasional. Sebagaimana ditulis pada banyak literatur, bahwa Selat Malaka merupakan pintu masuk bagi jalur niaga internasional di Asia Tenggara. Dalam perjalannya menuju Kanton misalnya, para pedagang Arab terlebih dahulu harus berlayar menuju Gujarat, lalu Malabar, Coromandel dan Selat Malaka. Dari Malaka mereka berlayar menuju Vietnam hingga akhirnya tiba di Kanton. Begitu pula sebaliknya, dalam perjalanan pulang, mereka juga akan singgah di Selat Malaka (Alfian, 1998).

Dalam kaitannya dengan proses Islamisasi, kontak antara penduduk lokal dengan para pedagang muslim Arab telah terjalin sejak abad ke-7. Hal ini sebagaimana catatan J.C. van Leur (1960) bahwa pada tahun 674 sudah ada perkampungan/koloni Arab di Barus, Sumatera Utara. Hanya saja, Islam barulah dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat di Nusantara pada abad ke-13, yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sebagai Kesultanan Islam pertama di Nusantara.

Samudra Pasai merupakan kesultanan Islam pertama di Nusantara, yakni pada abad ke-13. Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan menjadi wilayah kosmopolitan di Nusantara.³ Pada masa kejayaannya di awal abad ke-14, jumlah penduduk Samudra Pasai sudah mencapai 20.000 orang, termasuk di dalamnya komunitas dagang Benggala, Venezia, Turki, Arab, Persia, Gujarat, India, Melayu, Jawa dan Siam (Peret, 2011). Artinya, secara etnik, Samudra Pasai ketika itu sudah sangat beragam. Komunitas multikultur juga mengalami perkembangan pada masa Kesultanan Aceh. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan penemuan prasasti Tamil di Desa Neusu, Banda Aceh yang berisi sebuah keputusan yang diambil kelompok persatuan pedagang Tamil. Selain itu, di Teluk Lambaro juga ditemukan pecahan keramik Cina serta Thailand, Burma dan Vietnam. Bukti lainnya ialah berupa tembikar dari India dan Srilangka, keramik khas Tiongkok dan porselin. Feener (2011) menyebut hal ini sebagai sebuah bukti dari ramainya interaksi sosial antar kultur dan etnis di Aceh.

Tidak hanya di Aceh, komunitas multikultur juga terbentuk di berbagai kota pelabuhan di sepanjang Pantai Barat Sumatera hingga Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain-lain. Di Jawa, Kesultanan Islam yang pertama kali berdiri adalah Demak. Demak berdiri sekitar tahun 1500 seiring dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Setelah Demak, kemudian juga berdiri Kerajaan Banten, lalu Pajang dan Mataram sebagai penerus Demak. Dan seperti halnya di Sumatera, di Jawa muncul kota-kota pelabuhan yang ramai disinggahi bangsa asing seperti Banten, Jepara, Tuban, Gresik, Surabaya, Sedayu dan lain-lain. Pada masing-masing kota pelabuhan tersebut, juga terdapat perkampungan para pedagang asing seperti Arab, Persia, India, Cina, Turki, Tamil dan lain-lain (Tjandrasmita, 2014). Ma Huan mencatat bahwa di Kota pelabuhan di Pantai Utara Jawa, penghuninya terdiri atas tiga kelompok masyarakat, yakni: 1) etnis Tionghoa yang semuanya beragama Islam; 2) dari Barat, yakni Arab dan Persia yang juga beragama Islam; dan 3) pribumi (Tjandrasmita, 1982). Untuk orang Tionghoa, sebagaimana catatan Cheng Ho yang berkunjung ke Jawa pada tahun 1402, di Tuban, Gresik dan Surabaya, jumlah orang Tionghoa berkisar pada angka 1.000 orang. Selain itu, juga tidak ketinggalan ialah perkampungan para pedagang lokal seperti Bugis, Melayu, Banda, Banjar, Ternate dan lain-lain.

Hal yang sama juga terjadi di berbagai daerah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Di Maluku, muncul kota-kota pelabuhan yang cukup besar seperti Hitu, Jailolo, Bacan, Ternate, Tidore, dan Ambon (Leirissa, 1988). Di Sulawesi, muncul beberapa Kesultanan Islam seperti Goa, Bone, Luwu, Wajo, Sopeng, dan Tallo (Kartodirdjo, 2014). Adapun di Kalimantan,

terdapat kota-kota pelabuhan seperti Banjar. Pada masing-masing Kota pelabuhan dan Kesultanan tersebut juga terbentuk komunitas-komunitas multikultur, baik asing (Cina, Arab, India, Persia dll) ataupun lokal (Melayu, Jawa, dll).

Jejak-jejak komunitas multikultur tersebut, pada banyak daerah masih dapat ditemui jejaknya hingga hari ini. Hal ini dapat kita lihat dari keberadaan kampong-kampung (komunitas) Arab, India, China, Madura, Melayu di berbagai daerah di Indonesia, baik pada kota besar seperti Jakarta, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Palembang dan Makasar ataupun pada kota-kota kecil Bengkulu, Malang dan lain-lain.

3.2 Relasi dengan Bangsa Asing

Relasi dan kerjasama adalah hal mutlak dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks hubungan antar bangsa. Karena itu, relasi dan kerjasama antar bangsa merupakan sebuah hal yang biasa dalam perjalanan sejarah umat manusia, termasuk Indonesia.

Sifat terbuka dan pandangan *outward looking* masyarakat Nusantara pada gilirannya telah membuat masyarakat Nusantara terlibat dalam relasi dan interaksi terhadap dunia luar yang jauh lebih luas. Relasi tersebut tidak hanya terbatas pada bangsa Arab sebagai kiblat umat Islam atau negara-negara muslim lainnya, tetapi juga terhadap bangsa-bangsain lain seperti Cina, Burma, Thailand, India hingga bangsa Eropa yang secara kultur memiliki perbedaan yang sangat tajam. Hal ini merupakan sebuah realita historis yang menarik, yang oleh banyak ahli sering disebut dengan istilah kosmopolitanisme islam atau islam kosmopolit yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pandangan dunia yang menempatkan semua manusia di dalam satu kosmos, yang meski sangat beragam namun adalah komunitas tunggal (Madjid, 1998).

Secara umum, terdapat beberapa bangsa asing yang tercatat memiliki relasi langsung dengan kesultanan Islam di Nusantara, yakni Arab, Turki, Persia, Gujarat, India, Venesia, Cina, Burma, Srilangka, Thailand, Inggris, Portugis dan Belanda. Selain itu, relasi juga terjalin antar masyarakat lokal Nusantara, seperti Jawa, Melayu, Bugis, dll (Ricklefs, 2008; Tjandrasasmita, 2014). Pada umumnya relasi tersebut berlangsung dalam konteks perdagangan atau dunia niaga. Dalam konteks ini, para pedagang lokal bertindak sebagai penyedia komoditi yang mereka buatkan atau sebagai penghubung antara para pedagangasing dengan para petani sebagai sumber utama. Dalam konteks ini pula, para penguasa lokal akan bertindak sebagai “pemberi rasa aman” dan sebagai imbalannya maka mereka akan mendapatkan upeti. Jadi relasi terjalin dalam posisi yang sama, yakni sebagai mitra atau kawan dimana semua pihak akan sama-sama mendapat keuntungan.

Akan tetapi, relasi juga terjadi dalam bentuk dan bidang lainnya, seperti agama, pendidikan, dan politik. Dalam bidang agama dan pendidikan misalnya, relasi dibangun untuk kepentingan dakwah dan pengajaran agama Islam, dimana penguasa lokal banyak mendatangkan ulama dari Timur Tengah sebagai gurudan juru dakwah. Dalam bidang politik, sebagaimana relasi antara Aceh

dan Turki, relasi terjalin dalam rangka menghadapi ancaman dari bangsa Eropa, terutama sejak dikuasainya Malaka oleh Purtugis pada tahun 1511.

Relasi tersebut memang tidak selamanya berjalan lancar. Pada kasus-kasus tertentu, relasi bisa berubah menjadi kontestasi dan pertemanan dapat berubah menjadi permusuhan. Hal ini tidak hanya terjadi antara kesultanan Islam di Nusantara dengan bangsa asing, tapi juga terjadi antar kesultanan di Nusantara itu sendiri. Namun, sikap terbuka dan kesedian untuk menerima berbagai unsur baru dari luar merupakan salah satu ciri utama masyarakat Nusantara pada zaman Kesultanan Islam. Dan ini adalah contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia dewasa ini yang dihadapkan pada persoalan politik identitas.

3.3 Pertukaran Budaya

Terbentuknya komunitas multikultur masyarakat Nusantara pada zaman Kesultanan Islam mau tidak mau akan memberikan dampak dalam bidang kebudayaan. Hal ini dikarenakan masing-masing bangsa datang dengan membawa berbagai artibut dan simbol kebudayaan yang mereka miliki. Ditambah lagi dengan sifat karakter penyebaran Islam di Indonesia yang lebih banyak melibatkan proses akomodasi terhadap kepercayaan dan kebudayaan lokal (Azra, 2011). Dari interkasi inilah kemudian lahir pertukaran budaya seperti agama, pakaian, kuliner, tradisi keagamaan, arsitektur dan lain sebagainya. Pada beberapa bagian, kebudayaan asing tersebut ada yang diterima secara utuh, ada yang ditolak atau tidak diterima dan ada pula yang berakulturasi dengan kebudayaan lokal yang sudah ada. Karena itu, tidak heran jika kita menemukan ada banyak unsur kebudayaan asing dalam kebudayaan masyarakat Indonesia dewasa ini.

Unsur kebudayaan Arab (Timur Tengah) misalnya dapat kita temukan dengan mudah dalam hal keagamaan atau praktek (tradisi) keagamaan, kosa kata hingga nama. Tradisi keagamaan mislanya, hingga hari ini masih bisa kita jumpai berbagai tradisi Islam yang telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan lokal seperti tradisi Tabot atau Tabut di Bengkulu dan Tabuik di Paraiaman yang berasal dari tradisi Islam Syia di Iran (Dahri, 2009; Poniman; 2014). Di Bengkulu, tradisi Tabot/Tabut telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan lokal sehingga tidak lagi menjadi milik masyarakat tertentu, namun telah menjadi milik masyarakat Bengkulu secara keseluruhan (Marhayati & Suryanto, 2017; Syaputra, 2019). Tidak hanya pada tradisi keagamaan, unsur budaya Timur Tengah juga dapat ditemukan pada bangunan kegamaan seperti masjid, yang memadukan berbagai unsur kebudayaan seperti Turki dan Arab (Soekmono, 1973). Akan tetapi, penting juga untuk di catat bahwa masjid-masjid pertama di Indonesia bentuknya menyerupai arsitektur lokal, yakni warisan Hindu-Budha (Kuntowijoyo, 1991).

Unsur kebudayaan Cina dapat kita lihat dari bangunan, kuliner dan busana. Begitu pula dengan unsur kebudayaan bangsa lain yang juga dapat kita temukan jejak-jejaknya di berbagai tempat di Nusantara. Selain itu, kita juga bisa dengan mudah menemukan sebuah perpaduan antara beberapa unsur budaya (akulturasi), baik pada tradisi/ritual, kesenian, dan lain-lain.

IV. KESIMPULAN

Multikulturalisme bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Nusantara/Indonesia, terutama sejak kedatangan Islam pada abad ke-7 dan lebih-lebih setelah mengalami perkembangan pesat pada abad ke-13 dan masa-masa sesudahnya. Multikulturalisme masyarakat Indonesia pada zaman kesultanan Islam dapat dilihat setidaknya melalui tiga aspek. *Pertama*, munculnya komunitas multikultur (Benggala, Venesia, Turki, Arab, Persia, Gujarat, India, Melayu, Jawa, Siam dll) di berbagai kota pelabuhan di Indonesia, mulai dari Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Ternate, Tidore, Gowa Tallo dan lain-lain. *Kedua*, sikap terbuka masyarakat Nusantara terhadap bangsa asing sehingga melahirkan relasi yang intens dengan banyak bangsa, tidak hanya terbatas pada bangsa muslim, tetapi juga dari bangsa lain seperti China dan bangsa Eropa. *Ketiga*, terjadi pertukaran budaya antara masyarakat Nusantara dengan bangsa asing sehingga melahirkan berbagai corak kebudayaan baru sebagai hasil akulturasi. Akulturasi ini antara lain terjadi dalam bidang pakaian, nama, arsitektur, kuliner, tradisi, keyakinan, dll.

Dalam konteks Indonesia kekinian, khususnya masyarakat Islam, multikulturalisme masyarakat Nusantara zaman Islam tersebut merupakan sebuah *role model* serta sumber pelajaran penting tentang bagaimana perbedaan diposisikan sebagai *sunnatullah*, bukan sebagai sumber permusuhan. Singkatnya, praktek-praktek multikulturalisme masyarakat Nusantara pada zaman Islam masih sangat relevan dan dirasa sangat perlu untuk diaktualisasikan kembali dalam kehidupan saat ini.

REFERENSI

- Abidin, Z. (2009). Islam dan Tradisi Lokal dalam Perspektif Multikulturalisme. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 8 (2): 283-295.
- Alfian, I. (1998). *Bandar-Bandar Niaga di Sekitar Selat Malaka*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Anwar, M. S. (2007). *Islam, Pluralisme dan Multikulturalisme di Era Globalisasi*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Azra, A. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Azra, A. (2011). Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Indonesia: Perspektif Islam dan Ketahanan Budaya. Dalam Thung Ju Lan & M. Azzam Mannan (ed). *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia Sebuah Tantangan*. Jakarta: Obor.
- Dahri, H. (2009). *Tabot: Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu*. Jakarta: Penerbit Citra.
- Feener, R. M. (2011). *Aceh: Masa Lalu dan Studi Masa Kini*. Jakarta: KITLV

- Hall, D.G.E. (1984). *Sejarah Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malayia.
- Harahab, A. R. (2006). Multikulturalisme dalam Bidang Sosial. *Jurnal Etnovisi*, 2 (1): 32-35.
- Harahab, S. (2011). *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada.
- Huat, C. B. (2002). Multiculturalism in Island South-East Asian. *Antropologi Indonesia*, 69 (1): 118-123.
- Joebagio, H. (2013). Politik Islam dalam Pusaran Sejarah Surakarta. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 13 (1): 155-177.
- Kahn, J. S. (2016). *Kultur, Multikultur, Postkultur Keragaman Budaya dan Imperialisme Kapitalisme Global*. Terj. M Muhibuddin. Yogyakarta: Institute of Nation Development Studies.
- Kartodirdjo, S. (2014). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900*. Yogyakarta: Ombak.
- Krippendorff, K. (1991). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. (Terj. Farid Wajidi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kymlicka, W. (2002). *Kewarganegaraan Multikultural*. Terj. Edlina H Eddin. Jakarta: LP3ES.
- Leirissa, R. Z. (1998). *Bandar-Bandan Niaga di Perairan Maluku*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Leur, J. C. V. (1960). *Indonesia Trade and Society*. Bandung: Sumur Bandung.
- Madjid, N. (1998). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Marhayati, N., & Suryanto. (2017). The Acculturation Strategy of the Tabut Community in Bengkulu. *Studia Islamica*, 24 (3), 403-433.
- Perret, D. (2011). *Aceh sebagai Wilayah Studi Sejarah Masa Lampau*. Jakarta: Pustaka Larasan-KITLV Jakarta.
- Poniman, AK. (2014). *Dialektika Agama dan Budaya dalam Upacara Tabot*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Priyono, AE. (2008). Marginalisasi, Oposisi dan Integrasi Islam di Indonesia: Menyimak Pemikiran Kuntowijoyo. Dalam Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Grafiti.
- Ried, A. (2014). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Soekmono, R. (1973). *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunanto, M. (2005). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suparlan, P. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indonesia*, 69 (1): 98-105.
- Syaifuddin, A. F. (2006). Membumikan Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Etnovisi*, 2 (1): 3-11.
- Syaputra, E. (2019). Local Wisdom for Character Education: A Study of Character Values in Tabot Tradition in Bengkulu. *Indonesian Journal of Social Science Education*, 1 (2): 116-124. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/ijssse.v1i2.2245>
- Tilaar, HAR. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia.
- Tjandrasasmita, U. (2014). *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Gramedia.
- Tjandrasasmita, U (ed). (1982). *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.